

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam era modernisasi pemerintahan dan desentralisasi fiskal, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah daerah sebagai entitas publik memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab dan terbuka kepada masyarakat. Sejalan dengan (Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diberikan otonomi yang luas untuk mengelola sumber daya keuangannya, namun juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan tersebut secara akuntabel.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan syarat mutlak untuk membangun kepercayaan publik. Menurut (Mardiasmo, 2018) Informasi yang transparan memungkinkan masyarakat untuk memahami proses pengambilan keputusan pemerintah dan memberikan ruang untuk pengawasan sosial.

Salah satu instrumen utama untuk mewujudkan transparansi dalam sektor publik adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan dana publik. Menurut (Mahmudi, 2019) LKPD bukan hanya alat pelaporan keuangan, tetapi juga menjadi sarana akuntabilitas publik, di mana kualitas dan keterbukaan laporan akan menentukan persepsi publik terhadap integritas dan efisiensi pengelolaan anggaran.

Namun, dalam praktiknya, penerapan transparansi dalam penyusunan dan penyampaian LKPD di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan. (Kurniawan & Dewi, 2022) menyatakan bahwa banyak pemerintah daerah belum maksimal dalam menyediakan informasi keuangan yang mudah diakses, dipahami, dan digunakan oleh publik. Hal ini diperburuk oleh rendahnya literasi fiskal masyarakat serta kurangnya sistem yang mendorong partisipasi publik dalam pengawasan anggaran.

Akuntabilitas sebagai prinsip kedua yang tak terpisahkan dari transparansi, mengacu pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan kebijakan publik kepada pemangku kepentingan. Menurut (Romzek & Dubnick, 1987) akuntabilitas dalam sektor publik terdiri dari empat dimensi: *hierarchical*, *legal*, *professional*, dan *political accountability*. Dalam konteks keuangan daerah, dimensi ini menuntut pemerintah tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab moral dan etis dalam penggunaan anggaran.

Kabupaten Nias Utara, sebagai daerah yang termasuk dalam kategori wilayah tertinggal dan kepulauan, menghadapi tantangan tersendiri dalam membangun sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Meskipun telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK selama beberapa tahun terakhir, sejumlah catatan dan temuan BPK masih menunjukkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal, sistem pelaporan, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam menilai dan mengawasi pengelolaan anggaran.

Dalam konteks tersebut, penting untuk dilakukan kajian yang mendalam mengenai tingkat transparansi LKPD di Kabupaten Nias Utara, serta hubungannya dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena tidak hanya melihat aspek teknis penyajian laporan, tetapi juga menelusuri faktor-faktor institusional, kultural, dan struktural yang memengaruhi implementasi transparansi di tingkat daerah. Lebih lanjut, pendekatan kualitatif studi kasus yang digunakan memungkinkan pengungkapan realitas sosial dan birokratis yang tidak tampak dalam data kuantitatif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam penguatan model transparansi keuangan publik, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi penyusunan dan publikasi LKPD yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga strategis dalam mendorong perbaikan sistem keuangan publik di daerah-daerah yang memiliki karakteristik geografis dan kelembagaan yang

kompleks seperti Nias Utara.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik mengangkat judul “ANALISIS TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA : STUDI KASUS PADA BPKPD KABUPATEN NIAS UTARA”.

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang di peroleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan.

(Sugiyono, 2017) pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan meliputi:

1. Sejauh mana transparansi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Nias Utara
2. Kepatuhan penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) dalam penyajian laporan keuangan
3. Ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan kepada publik dan lembaga pengawas

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nias Utara?
2. Bagaimana transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi transparansi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tingkat transparansi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nias Utara
2. Menjelaskan pengaruh tranparasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Nias Utara.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Penulis
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bukti empiris yang ada tentang analisis transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nias Utara
2. Bagi Pemerintah Daerah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi umpan balik nilai untuk perkembangan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Bagi Almamater
Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi, menambah ilmu pengetahuan dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi

penelitian serupa dimasa yang akan datang.

4. Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengetahui Laporan Keuangan pemerintah Daerah (LKPD) dan dapat melihat sejauh mana transparansi keuangan daerahnya.